

Pengaruh Transparansi Pengelolaan, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Minat Masyarakat Di Uek-Sp Kelurahan Kampung Baru-Kota Dumai

Anisa Putri

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

anisaputri@iaitfdumai.ac.id

Abstrak

Pengaruh Transparansi Pengelolaan, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Minat Masyarakat Di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai. Dibimbing oleh Dr (C) Faizal Nurmatias, M.E dan Tengku Mahesa Khalid, M.M. Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah salah satu program yang berperan dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk menambah penghasilan sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Minat pemanfaatan UEK-SP di Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai masih rendah dan didominasi oleh pengusaha tingkat menengah keatas. Hal ini disebabkan masih kurangnya transparansi, akuntabilitas dan responsive pengelolaan dana tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan, akuntabilitas dan responsif terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kuantitatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 85 responden. Analisis data menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan bantuan Software SPSS 16.0 Windows 7. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan, akuntabilitas dan responsif secara bersama sama memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap minat masyarakat Di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai dengan kontribusi sebesar 23,2%. Secara parsial transparansi, akuntabilitas dan responsif memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap masyarakat Di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai.

Kata kunci: Transparansi, akuntabilitas, responsif dan Uek-Sp.

Abstract

The Influence of Management Transparency, Accountability and Responsiveness to Community Interests in UEK-SP Kampung Baru Village, Bukit Kapur District, Dumai City. Supervised by Dr (C) Faizal Nurmatias, ME and Tengku Mahesa Khalid, MM. The Savings and Loans Village Economic Business Program (UEK-SP) is one of the programs that play a role in assisting the community in developing businesses to increase income as a poverty alleviation measure. Utilization of UEK-SP interest in Kampung Baru Sub-District in Bukit Kapur District-Dumai City is still low and dominated by middle and upper level entrepreneurs. This is due to the lack of transparency, accountability and responsiveness in the management of these funds. This research was conducted with the aim of knowing the effect of management transparency, accountability and responsiveness on public interest in UEK-SP Kampung Baru

Village, Bukit Kapur District, Dumai City. This study uses a quantitative method approach, the data used in this study is primary data obtained through distributing questionnaires to 85 respondents. Data analysis using Multiple Linear Regression Analysis with the help of SPSS 16.0 Windows 7 software. The results of the study indicate that management transparency, accountability and responsiveness together have a positive and significant influence on community interest in UEK-SP Kampung Baru Village, Bukit Kapur District, Dumai City with a contribution of 23.2%. Partially, transparency, accountability and responsiveness make a positive and significant contribution to the community in UEK-SP, Kampung Baru Village, Bukit Kapur District, Dumai City.

Keywords: Transparency, accountability, responsiveness and Uek-Sp.

Pendahuluan

Salah satu program upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat adalah Program Pemberdayaan Desa (PPD). Program ini bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan melalui pengembangan ekonomi masyarakat dengan pemberian Dana Usaha Kelurahan (DUK). Salah satu aspek dalam pelaksanaan PPD adalah Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) (Hildawati, 2020).

Program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) adalah salah satu program yang berperan dalam membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha untuk menambah penghasilan sebagai langkah penanggulangan kemiskinan. Hal ini diperkuat dengan komitmen usaha mempercepat pengentasan masalah kemiskinan yang dituangkan melalui Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang pembentukan komite Penanggulangan Kemiskinan dan diperkuat dengan Keppres Nomor 8 Tahun 2002 serta dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. (Maiyori, 2021).

Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) merupakan lembaga kelurahan yang bergerak dibidang keuangan untuk menunjang usaha ekonomi produktif di kelurahan yang bersangkutan. UEK-SP berfungsi sebagai lembaga keuangan kelurahan untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran kredit tersebut. Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dibentuk melalui Musyawarah Kelurahan dan ditetapkan melalui keputusan Kepala Kelurahan. Keputusan Kepala Kelurahan tentang pembentukan UEK-SP berlaku setelah mendapat pengesahan dari Bupati atau Walikota (Maiyori, 2021).

Prinsip dasar pelaksanaan program Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam Program Pemberdayaan Desa (PPD) yaitu lembaga keuangan kelurahan untuk menyalurkan dana melalui mekanisme penyaluran penyaluran kredit dan penarikan dana dari penyaluran tersebut serta pengelola Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) dalam melaksanakan program ini harus transparan, memihak kepada masyarakat miskin, desentralisasi atau dapat dikerjakan oleh masyarakat, akuntabilitas, kompetisi sehat, termasuk dalam hal usulan, pemilihan pengelola, sistem pengelolaan serta penyaluran dana. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) harus dapat diketahui oleh masyarakat setempat dengan mudah dan terbuka, disebarluaskan melalui papan informasi, selebaran, pertemuan, pertemuan atau melalui media lainnya.

Dalam syariat Islam praktik simpan pinjam (qard) adalah salah satu transaksi muamalah yang diperbolehkan. Dari sisi muqrith (orang yang memberikan utang), Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang. Dari sisi muqtaridh, utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkan dibolehkan karena seseorang berhutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang yang dihutangkan itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ia akan mengembalikannya persis seperti yang diterimanya (Muslich, 2010).

Dasar hukum utang-piutang atau qardh, dalam al-Qur'an diantaranya adalah QS. Al-Baqarah (245) :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

Kemudian juga dalam Surah al-Haddid ayat 11 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya : “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya. Dan, dia akan memperoleh pahala yang banyak”.

Pengelolaan Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (UEK-SP) yang baik dengan prinsip-prinsip good governance membutuhkan transparansi, akuntabilitas dan responsive dimaksudkan agar pengelola dapat berperilaku sesuai dengan etika dan aturan hukum yang berlaku dengan memberi kewajiban atas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat atau pihak yang berkepentingan. (Hikmah, 2019).

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Pengaruh Transparansi Pengelolaan, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Minat Masyarakat Di Uek-Sp Kelurahan Kampung Baru-Kota Dumai**”.

Metode Penelitian

Penelitian akan dilakukan di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Rentang Waktu penelitian dari bulan Juni hingga November 2022. Subjek pada penelitian ini yaitu seluruh masyarakat peminjam UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Bukit Kapur. Objek pada penelitian ini yaitu pengaruh transparansi pengelolaan, akuntabilitas dan responsif terhadap minat masyarakat di uek-sp kelurahan kampung baru-kota dumai. Populasi pada seluruh masyarakat peminjam UEK-SP Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai pada tahun 2022 berjumlah 568 orang. Jumlah sampel untuk penelitian ini adalah 85 orang. Teknik yang digunakan adalah Teknik *Purposive Sampling*. Data dikumpulkan melalui penyebaran angket dan hasil wawancara. Data dianalisis menggunakan analisis regresi dengan bantuan spss 21.

Pengaruh transparansi pengelolaan UEK-SP di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Tabel 1. Descriptive Statics

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transparansi (X1)	85	14.00	19.00	33.00	25.8353	3.44980
Akuntabilitas (X2)	85	16.00	19.00	35.00	27.8941	3.60893
Responsif (X3)	85	19.00	16.00	35.00	28.6118	4.19210
Minat (Y)	85	20.00	15.00	35.00	27.4588	4.01056
Valid N (listwise)	85					

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 1, diketahui nilai rata – rata variabel pengaruh transparansi pengelolaan UEK-SP bagi masyarakat sebesar 25,83. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori cukup artinya pengaruh transparansi pengelolaan UEK-SP bagi masyarakat terbukti cukup, hal ini dibuktikan melalui hasil responden masyarakat yang menyatakan setuju bahwa mahasiswa merasa penilaian produk pada toko online membuat lebih mudah untuk berbelanja online, mahasiswa merasa penilaian pada toko online membantu menentukan pilihan pembelian, saya merasa penilaian pada aplikasi toko online memberikan informasi mengenai kelebihan dan kekurangan produk, mahasiswa merasa mendapatkan manfaat dari adanya online customer review/penilaian produk, dll. Dalam hal ini masuk ke dalam kategori cukup.

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat. Tujuan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah desa yaitu :

- Salah satu wujud pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.
- Upaya peningkatan manajemen pengelolaan pemerintah.
- Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan mengurangi kesempatan praktek KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). (Mardiasmo, 2009).

Pengaruh akuntabilitas pengelolaan UEK-SP di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Berdasarkan tabel 1, diketahui nilai rata – rata variabel Pengaruh akuntabilitas pengelolaan UEK-SP bagi masyarakat sebesar 27,89. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori baik Artinya Pengaruh akuntabilitas pengelolaan UEK-SP bagi masyarakat terbukti baik, hal ini dibuktikan melalui hasil responden masyarakat yang menyatakan setuju bahwa masyarakat merasa penilaian produk pada toko online membuat lebih mudah untuk berbelanja online, mahasiswa merasa penilaian pada toko online menentukan pilihan pembelian, saya merasa penilaian pada aplikasi toko online memberikan membantu informasi mengenai kelebihan dan kekurangan produk, mahasiswa merasa mendapatkan manfaat dari adanya online customer review/penilaian produk, dll. Dalam hal ini masuk ke dalam kategori baik.

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai efisien, efektivitas, dan reliabilitas dalam pelaporan keuangan desa yang berisi kegiatan, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Bentuk pertanggungjawaban publik oleh pemerintah salah satunya ialah akuntabilitas hukum dan peraturan. Akuntabilitas hukum dari peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik. Untuk menjamin dilaksanakannya akuntabilitas hukum dan peraturan oleh pemerintah daerah, maka perlu dilakukan audit kepatuhan (*compliance audit*). (Mardiasmo, 2009).

Pengaruh responsif pengelolaan UEK-SP di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Berdasarkan tabel 1, diketahui nilai rata – rata variabel Pengaruh responsif pengelolaan UEK-SP bagi masyarakat sebesar 28,61. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori baik Artinya

Pengaruh responsive pengelolaan UEK-SP bagi masyarakat terbukti baik. hal ini dibuktikan melalui hasil responden masyarakat yang menyatakan setuju bahwa Persoalan-persoalan masyarakat dilayani dengan sigap oleh pengelola dana, Pengelola menangani setiap keluhan masyarakat dengan sabar. Pengelola merespon setiap keluhan masyarakat dengan cepat. Pengelola lebih mengutamakan aspirasi masyarakat dibandingkan beberapa kelompok tertentu. Pengelola mengalokasikan keuangan sesuai dengan rencana yang telah disusun, Pengelola secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, Setelah menampung persoalan-persoalan masyarakat pengelola melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum. Dalam hal ini masuk ke dalam kategori baik.

Responsif dalam pelaksanaan prinsip-prinsip *good and clean governance* bahwa pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan masyarakatnya, yang menunggu mereka menyampaikan keinginan-keinginannya, tetapi mereka secara proaktif mempelajari dan menganalisa kebutuhan-kebutuhan masyarakat, untuk kemudian melahirkan berbagai kebijakan strategis guna memenuhi kepentingan umum.

Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus memiliki dua etika, yakni etika individual dan etika sosial. Kualifikasi etika individual menuntut pelaksana birokrasi pemerintah agar memiliki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. Sedangkan etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas terhadap berbagai kebutuhan publik.

Dalam upaya mewujudkan asas responsif sebagai asas fundamental menuju tatanan *good governance*, pemerintah harus melakukan upaya – upaya strategis dalam memberikan perlakuan yang humanis pada kelompok-kelompok marginal tersebut. (Purnomo, 2012).

Pengaruh minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Berdasarkan tabel 1, diketahui nilai rata – rata variabel Pengaruh minat masyarakat UEK-SP bagi masyarakat sebesar 27,45. Nilai tersebut termasuk kedalam kategori baik Artinya Pengaruh minat masyarakat di UEK-SP bagi masyarakat terbukti baik. hal ini dibuktikan melalui hasil responden masyarakat yang menyatakan setuju bahwa Berniat untuk mencari tahu informasi lebih dalam mengenai simpan pinjam di UEK SP, Mengetahui informasi bahwa

terdapat simpan pinjam di UEK SP. Memilih meminjam di UEK SP karena bunga rendah dan procedure lebih mudah, Memilih meminjam di UEK SP karena mengikuti orang yang saya percaya, Tertarik meminjam di UEK SP karena teman atau kerabat saya merasa puas menjadi anggota UEK SP, Berminat meminjam di UEK SP karena bunga rendah dan mudah dijangkau seluruh lapisan masyarakat, Sangat berminat untuk mengambil pinjaman di UEK SP dalam pengembangan usaha. Dalam hal ini masuk ke dalam kategori baik.

Menurut Sumadi Suryabrata, minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya (Suryabrata, 2012)

Minat merupakan keinginan yang timbul dari diri sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Minat adalah rasa suka (senang) dari rasa tertarik pada suatu objek atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh atau biasanya ada kecenderungan untuk mencari objek yang disenangi tersebut.

Minat lebih dikenal sebagai keputusan pemakaian atau pembelian jasa/produk tertentu. Keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan keputusan atas pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau tidak melakukan pembelian dan keputusan tersebut diperoleh dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yaitu kebutuhan dan dana yang dimiliki (Albertus, 2016).

Minat adalah kecenderungan jiwa yang relatif menetap kepada diri seseorang dan biasanya disertai dengan perasaan senang. (Faturrohman, 2012). Minat adalah keinginan yang terus menerus untuk memperhatikan atau melakukan sesuatu. Minat dapat menimbulkan semangat dalam melakukan kegiatan tersebut dapat tercapai. Dan semangat yang ada itu merupakan modal utama bagi setiap individu untuk melakukan suatu kegiatan. (Depdikbud, 1997).

Firman Allah SWT tentang minat dalam Al-Quran Surah Al-Isra' ayat 84 yang berbunyi :

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya : "Katakanlah "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing".

Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Pengaruh transparansi pengelolaan UEK-SP terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

**Tabel 2. Hasil Uji Koefisien
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.952	5.237		.564	.575		
	Transparansi (X1)	.417	.117	.359	3.576	.001	.943	1.060
	Akuntabilitas (X2)	.249	.110	.224	2.264	.026	.965	1.037
	Responsif (X3)	.237	.095	.248	2.505	.014	.970	1.031

a. Dependent Variable : Minat

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Koefisien variabel transparansi (X1) sebesar 0,417 dan bernilai positif, dengan nilai signifikan $0,026 < 0,05$ berarti variabel transparansi memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Artinya adalah jika transparansi kegiatan UEK SP semakin ditingkatkan maka minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai juga akan meningkat.

Pengaruh akuntabilitas pengelolaan UEK-SP terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Koefisien variabel Akuntabilitas (X2) sebesar 0,249 dan bernilai positif dengan nilai signifikan sebesar $0,026 < 0,05$ berarti variabel Akuntabilitas memberikan kontribusi positif

dan signifikan terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Artinya adalah jika Akuntabilitas kegiatan UEK SP semakin ditingkatkan maka minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai juga akan meningkat.

Pengaruh responsif pengelolaan UEK-SP terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Koefisien variabel Responsif (X3) sebesar 0,237 dan bernilai positif dengan nilai signifikan sebesar 0,014 <0,05 berarti variabel Responsif memberikan kontribusi positif dan signifikan terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai Artinya adalah jika Responsif pengelolaan kegiatan UEK SP semakin ditingkatkan maka minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai juga akan meningkat.

Pengaruh transparansi pengelolaan, akuntabilitas dan responsif terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.482 ^a	.232	.204	3.57888

a. Predictors: (Constant), Responsif (X3), Akuntabilitas (X2), Transparansi (X1)

b. Dependent Variable: Minat (Y)

Sumber: Data Primer yang diolah (2022)

Dari tabel di atas diketahui untuk menghitung besarnya pengaruh transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai dari tabel Model Summary, R Square = 0,232 ini berarti bahwa kontribusi transparansi, akuntabilitas dan responsif terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai adalah sebesar

23,2% dan 76,8% dipengaruhi oleh faktor lainnya diluar faktor transparansi, akuntabilitas dan responsif.

Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian skripsi yang berjudul Pengaruh Transparansi Pengelolaan, Akuntabilitas dan Responsif Terhadap Minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Transparansi pengelolaan UEK-SP terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai termasuk ke dalam kategori cukup, dengan nilai rata-rata 25,84. Akuntabilitas pengelolaan UEK-SP terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai termasuk ke dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata 27,89. Responsif pengelolaan UEK-SP terhadap minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai termasuk ke dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata 28,61.

Minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai termasuk ke dalam kategori baik, dengan nilai rata-rata 27,45. Transparansi berpengaruh positif signifikan terhadap Minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Akuntabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap Minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. Responsif berpengaruh positif signifikan terhadap Minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

Pengaruh transparansi pengelolaan, akuntabilitas dan responsif secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Minat masyarakat di UEK-SP Kelurahan Kampung Baru Di Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai.

Saran

Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian tentang gambaran kualitas pelayanan pengelola UEK-SP Kelurahan Kampung Baru di Kecamatan Bukit Kapur-Kota Dumai.

Daftar Isi

- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 274.
- Albertus. Psikolog. Bandung : PT. Raja Grafindo 2016. Hal 32
- Andriani M. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Luk, Kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa)*. *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknologi Sumbawa*. 2018.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemah*. Jakarta : PT. Surya Prisma, 2012..
- Hildawati dan Suri DM. *Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai*. Publika : *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Vol. 6, No. 1 / 2020.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 301
- Hikmah L. *Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Responsif Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Di Desakedungringin Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi*. *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*. 2020.
- Kristianten, *Akuntabilitas Kinerja Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2014. 52.
- Mahmud, Dimiyati. 2011. *Psikologi Suatu Pengantar*. BPFE. Yogyakarta. 2011.
- Maiyori C, Wismar, Daen FY. *Pelaksanaan Perjanjian Modal Usaha Mikro Pada Usaha Ekonomi Kelurahan Simpan Pinjam (Uek-Sp) Di Kelurahan Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi*. *Jurnal Hukum Doctrinal: Volume 6, Nomor 2, September 2021*.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. ANDI OFFSET. 2009. 21-23.
- Miflen, Fj dan Miflen, Fc. *Simply-Psichology*. Raja Grafindo Pustaka. Jakarta.2003.
- Nurhadianto T dan Khamisah N. *Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah: Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Lampung*. *Jurnal TECHNOBIZ Vol. 3, No. 5, 2019, 25-30. ISSN 2655-3457*
- Purnomo J. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Yogyakarta : Penerbit Infest. 2016 ; 25-26.
- Permendagri No.113 Tahun 2014 *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Rasul. *Pembangunan Ekonomi Desa*. Bandung : Graha Ilmu. 2012; 82.
- Sondang P Siagian. *Teori Motivasi dan Aplikasi*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta. 1996.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Yogyakarta: Sinar Baru Algensindo. 2014. h. 323.
- Suryabrata S. Psikolog. Jakarta : PT. Raja Grafindo 2012. Hal 68.
- Ultafiah W. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Patisipasi Terhadap Pengelolaan Dana Desa untuk mewujudkan Good Governance pada Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Palembang. 2017.
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta. 2004.